

Beranda > Kolom

Darurat Kurikulum Kebencanaan

Editor **Chairil Anwar** — 7 Januari 2019 in **Kolom, Kolom Pakar**





INT

Abdurrahman

Akademisi FKIP Universitas Lampung

RANGKAIAN musibah yang menimpa bangsa ini telah menyisakan dampak yang serius pada seluruh aspek kehidupan kita. Bencana alam yang bertubi-tubi seperti gempa bumi, tsunami, longsor, erupsi gunung merapi, banjir, topan, dan angin puting beliung telah menyebabkan hilangnya nyawa manusia, hancurnya infrastruktur, dan kerusakan sejumlah potensi perekonomian masyarakat.

Satu hal yang sering membuat kita sesak dada adalah banyaknya jatuh korban nyawa manusia, terutama anak-anak generasi bangsa yang selalu paling parah terdampak. Padahal, mereka merupakan aset bangsa di masa yang akan datang.

Walaupun berulang kali bencana kerap menyapa bangsa ini, sepertinya generasi dan masyarakat kita juga berulang secara ritmik merespons peristiwa-peristiwa ini dengan sekadar memberikan “reaksi spontan”, bukan “reaksi yang terencana”, sehingga terkesan sama sekali tidak memiliki literasi kebencanaan yang memadai untuk mengurangi dampak risiko bencana.

BACA JUGA

Memidanakan Perusak Jalan

Mabok Durian

AKIBATNYA, banyak jatuh korban hanya karena sangat panik ketika terjadi peringatan dini atau bencana yang secara mendadak datang melanda. Kondisi ini memunculkan sejumlah wacana tentang pentingnya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran atau lebih tepatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Disaster awareness telah menjadi *learning outcome* atau sejumlah kompetensi dasar yang ditanamkan sejak dini kepada anak-anak dan masyarakat di negara-negara yang rawan terdampak bencana alam, seperti Jepang, Amerika Serikat, Cile, Meksiko, dan sejumlah negara di



SMA) yang merancang sejumlah kompetensi secara berkelanjutan dengan nilai graduasi kompetensi yang utuh dari dimensi pengetahuan faktual sampai dimensi metakognisi.

Kurikulum terintegrasi tersebut menyajikan sejumlah pengalaman belajar anak-anak tentang apa yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan sesudah keadaan darurat akibat bencana, baik bencana alam maupun rekayasa manusia. Bahkan, setelah gempa Nigata tahun 2004 yang melululontakkan tersebut, bukan sekadar membangunkan kembali kesadaran bangsa Jepang akan budaya tanggap bencana. Namun, program pendidikan kebencanaan menjadi isu utama seluruh elemen masyarakat Jepang, sehingga mereka sangat *literate* dengan kondisi dan potensi wilayahnya.

Dampaknya adalah mereka bisa lebih dapat bernegosiasi bahkan bisa hidup berdampingan dengan bencana. Jepang saat ini telah menjadi negara dengan sistem manajemen kebencanaan yang sangat baik di dunia. Hampir semua komunitas di Jepang bukan sekadar memiliki *disaster curriculum*, tetapi sudah menerapkan model *safety management* yang andal.

Literasi Kebencanaan Rendah

Rendahnya kultur tanggap bencana masyarakat saat ini menunjukkan lemahnya kesadaran (*awareness*) tentang potensi lingkungan atau wilayah yang mereka diami. Walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran tentang di mana mereka tinggal, di negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi juga berada pada wilayah rangkaian cincin api pasifik atau *the pacific ring of fire* yang masih sangat aktif, sehingga sangat berpotensi terjadinya erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.

Bahkan, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan tsunami yang melanda sebagian pesisir Banten dan Lampung akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah banyak memakan korban baik jiwa maupun materi. Banyaknya korban yang jatuh bukan karena masyarakat tidak belajar dari peristiwa bencana sebelumnya seperti gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 atau beberapa waktu lalu di Ambon dan Palu serta Donggala, tetapi lebih pada masih rendahnya literasi kebencanaan yang dimiliki masyarakat.

Fakta-fakta ini sudah seharusnya menjadi *turning point of disaster management* di Indonesia. Wajar saja belakangan ini muncul wacana tentang pentingnya kurikulum kebencanaan segera dibuat dan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Hal mendasar ini muncul karena adanya kesadaran bahwa pendidikan masih merupakan wahana yang masif untuk membangun *awareness* dan *skills* mitigasi bencana masyarakat.

Para ahli pun sependapat bahwa membangun infrastruktur peralatan *system early warning* atau berbagai sarana seperti selter pengungsian adalah bukan satu-satunya solusi, tetapi merancang dan membangun kesadaran tentang pentingnya hidup berdampingan dengan bencana



Sudah hampir 11 kali ganti kurikulum, secara eksplisit tidak satu pun memasukkan konten dan konteks kebencanaan dalam rumusan kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Permasalahannya adalah sejauh mana persepsi dan daya nalar dan kita terhadap pengertian kurikulum. Sebab, sudah hampir 11 kali ganti kurikulum sejak tahun 1947 hingga kurikulum nasional 2015 yang saat ini masih dikenal sebagai kurikulum 2013, secara eksplisit tidak satu pun memasukkan konten dan konteks kebencanaan dalam rumusan kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu.

Berbagai pendapat dan usulan tentang pentingnya kurikulum kebencanaan saat ini semua masih bersifat orientasi konten. Sebab, sebagian besar masyarakat masih menganggap kurikulum hanya sejumlah konten materi pelajaran yang ditawarkan oleh institusi pendidikan untuk memperoleh seperangkat pengakuan jenjang akademik, sehingga reaksi yang muncul adalah pentingnya menyusun diberlakukannya kurikulum kebencanaan di semua jenjang pendidikan atau dimasukkan program ko-kurikuler seperti penguatan pendidikan karakter (PPK).

Reaksi ini sah-sah saja, tetapi tidak akan pernah memiliki dampak permanen pada peningkatan budaya atau kultur tanggap bencana masyarakat kita. Pertama, menambah mata pelajaran mitigasi bencana akan menambah beban belajar siswa yang sudah sedemikian sarat dengan mata pelajaran, terutama di pendidikan dasar, sehingga akan kembali menjadi beban kognitif siswa. Kedua, penguatan pendidikan karakter (PPK) selama ini implementasinya hanya mengaburkan hakikat pendidikan yang sebenarnya; ambigu. Pendidikan itu sejatinya adalah pendidikan karakter yang mengubah *behavior* peserta didik, baik aspek afektif, kognitif, maupun psikomotorik.

Saya cenderung sepaham dengan pendapat John Dewey bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pengalaman belajar total yang dirancang untuk memfasilitasi peserta didik belajar membangun hubungan yang berkualitas antara apa yang dipelajari dengan apa yang sedang berlangsung di luar sekolah. Definisi yang cenderung lebih humanis ini akan membuka secara lebih kasat mata tentang cara pandang kita terhadap dokumen kurikulum.

Inovasi Pembelajaran

Kurikulum nasional atau kurikulum 2013 yang ditelaah dan terus dikembangkan saat ini memang secara eksplisit tidak merumuskan sejumlah kompetensi yang gradual terkait dengan konsep kebencanaan. Akan tetapi, keluwesan definisi kurikulum tersebut memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para praktisi baik pada level kebijakan (Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau provinsi) maupun pada level operasional





curriculum (kurikulum terpadu). Paling tidak terdapat 10 model pengintegrasian analisis kurikulum yang berkembang saat ini, yaitu *fragmented, connected, nested, sequenced, shared, webbed, threaded, integrated, immersed, dan networked*.

Sebagai contoh, penulis mengambil kasus untuk di kelas V SD yang dalam dokumen kurikulum 2013 terdapat silabus dengan paling tidak terdapat empat tema yang sangat erat kaitannya dengan konten dan konteks kebencanaan, yaitu Benda-Benda di Lingkungan Sekitar, Peristiwa dalam Kehidupan, Ekosistem, dan Lingkungan Sahabat Kita.

Melalui model kurikulum terpadu *Webbed*, misalnya, guru dapat melakukan inovasi pembelajaran tematik, menggunakan suatu tema (misalnya lingkungan sahabat kita) sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Agar konten dan konteks tema tersebut lebih menyentuh aspek-aspek kompetensi kebencanaan, guru dapat mengelaborasi tema tersebut menjadi subtema-subtema, misalnya potensi bencana alam di sekitarku.

Dengan bimbingan pengawas dan kepala sekolah melalui supervisi klinis, guru secara bebas berkreasi merusmuskan sejumlah indikator pencapaian kompetensi (IPK) membangun kesadaran dan kompetensi siswa pada konten dan konteks kebencanaan tanpa menambah beban mata pelajaran kepada siswa.

Sekali lagi, intinya pada semua pengawas, kepala sekolah, terlebih guru yang merupakan penentu suasana iklim kelas, untuk berkreasi dan berinovasi berdasarkan pengembangan kurikulum yang dilakukan secara kritis, sehingga pembelajaran di kelas jauh lebih bermakna.

Tags: #Abdurahman #KolomPakar #KurikulumBencana #Opini

Share 2

Tweet

Send



Chairil Anwar





Pembayaran Menggunakan QRIS

LAMPUNG POST

NMID : ID2020029405640

A01



TOP NEWS

- ▶ Lifter Lampung Langsung Sabet Emas dan Perak
- ▶ Pj Kepala Daerah Harus Ditekan Bekerja Maksimal
- ▶ Vaksinasi Guru Syarat PTM Terbatas
- ▶ Diserang Hama Tikus, Jagung Gagal Dipanen





- ▶ Daring Tidak Membentuk Karakter Siswa
- ▶ Pendaftaran Prakerja Tingkatkan Inklusi Keuangan
- ▶ Surfing Indonesia Raih Tiket Olimpiade Tokyo

POPULAR POST



Pemetaan Jadi Kunci Keberhasilan PAUD HI

01

0 SHARES

02

Cerita Dewasa

0 SHARES

03

Dorong S-1 Bahasa Lampung di Unila

0 SHARES



KEBIASAAN BARU ▾ E-PAPER KORAN DIGITAL ▾ RUWA JURAI ▾ KOLOM ▾

WEEKEND ▾ FOTOGRAFI ▾ INFOGRAFIK INDEKS



05

Jumat, 4 Juni 2021

0 SHARES



FACEBOOK



TWITTER



YOUTUBE



RSS

Tentang Kami



LampungpostID adalah laman berita resmi Harian Umum Lampung Post. Laman ini berada dalam naungan PT Masa Kini Mandiri, penerbit Koran Lampung Post yang menyajikan informasi berkualitas untuk melengkapi kehadiran koran edisi cetak di masyarakat.

Alamat Kami

Jalan Soekarno Hatta No. 108 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung – Indonesia





Tentang Kami

Iklan & Sirkulasi

Dat Suranta Ginting : 0818-0684-8900

Indra Sutaryoto : 0813-7976-8307

Oki Haray : 0812-7200-461

Perwakilan Jakarta

Ilham P Wibowo : 081293251116

LampungpostID © 2019

